

# PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2020

Ferrel C. Kusen<sup>1,\*</sup>; Agustinus Pati<sup>2</sup>; Franky Rengkung<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi- Indonesia

\*Coressponding Author: [kusenferrel@gmail.com](mailto:kusenferrel@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel ini mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih dalam berpartisipasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat pemilih khususnya yang ada di Kecamatan Malalayang Kota Manado, dalam menentukan pilihan mereka pada Pilwako Kota Manado tahun 2020. Temuan penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya cukup beragam. Terjadi percampuran antara pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pilihan yang rasional. Namun jika diprosentasikan, preferensi mereka lebih didasarkan pada pendekatan psikologis, dimana mereka lebih melihat latar belakang pasangan calon dari siapa partai yang mendukungnya.

**Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado**

## ABSTRACT

*This article identifies the factors that influence voter preferences in participating in the 2020 Manado Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) election. Using a qualitative method, this article will identify and examine various factors that influence voters' preferences, especially in Malalayang District, Manado City. , in determining their choice in the 2020 Mayoral Election of Manado City. The research findings show that the factors that influence the preferences of the voting community in determining their choice are quite diverse. There is a mixture of sociological approach, psychological approach, and rational choice. However, if they are presented as a percentage, their preferences are based more on a psychological approach, where they look more closely at the background of the candidate pair from which party supports it.*

**Keywords: Political Participation; Election of Mayor and Deputy Mayor of Manado**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Di mana untuk mewujudkan pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan. Dengan pemilihan tersebut, rakyat Indonesia turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Pemilihan Umum merupakan salah satu momen penyaluran aspirasi bagi Masyarakat terhadap Pemerintah. Pada Pemilihan Umum, Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan orang yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif dalam masa jabatan lima Tahun.

Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Setiap keputusan Politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Masyarakat maka mereka berhak ikut serta menentukan isi keputusan Politik Pemberian suara dalam kegiatan Pemilihan Umum merupakan bentuk Partisipasi Politik aktif yang seringkali dilakukan oleh Masyarakat di daerah dibandingkan

dengan Partisipasi Politik lain. Kegiatan Partisipasi Politik, meskipun kelihatannya hanya menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye.

Sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa pemilihan Kepala Eksekutif Daerah melalui Pemilihan langsung (Pilkada Langsung) maka diadakanlah pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2005, 2010, 2016 dan 2020. Pada Pilkada langsung ini masyarakat diberi andil besar untuk memberikan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasi dalam bidang politik yang membedakannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin perwujudan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekrutmen pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal. Secara sederhana, pilkada adalah cara individu warga negara yang mendiami suatu daerah tertentu melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pilih.

Hal yang terpenting dalam mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah mengetahui bagaimana mereka menentukan pilihan mereka pada calon tertentu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka, atau pertimbangan-pertimbangan apa yang mereka pakai untuk menentukan preferensi mereka.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Masyarakat tentunya dalam mewujudkan haknya dalam partisipasi politik, dilakukan dengan menggunakan hak pilih dimana terkandung maksud adalah hak untuk menentukan pilihannya terhadap seseorang atau partai yang dapat membawa kepentingan dan aspirasinya, Sukarna (2007). Sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diantaranya dengan memilih Gubernur dan wakil Gubernur.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil - hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Davis (2010:142) menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.

Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001:201-202) menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.

Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000:419) menjelaskan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut-sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Sumaryadi (2010:46) menjelaskan bahwa arti partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti :

- a. Pikiran
- b. Tenaga
- c. Waktu
- d. Keahlian (skill)
- e. Modal
- f. Ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan

H.A.R.Tilaar, (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti.I. A. D (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Bentuk Partisipasi Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti I. A. D (2011: 58), terbagi atas:

- a. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan politik.
- b. Partisipasi non fisik Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah Politik.

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isi politik. Perilaku-perilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Sedangkan Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). (Hidajat Imam. 2009:12)

Dalam Negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.( Basri Seta. 2011:12).

Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.( Budiardjo Miriam. 2007:14.).

Menurut Budiardjo (2007), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington dan Nelson (1990) , bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

#### • **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Menurut Ramlan Surbakti (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak-hak mendapatkan jaminan sosial dan hukum.

Sedangkan menurut Weimer (dalam Subarsono, 2005) setidaknya ada lima penyebab factor-faktor yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi. Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.
2. Terjadinya perubahan – perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya

tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarluaskan seluruh ide-ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu-isu kebebasan pers.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Miriam Budiardjo (2007), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik :

1. Faktor sosial ekonomi
2. Faktor politik
3. Faktor fisik individu dan Lingkungan
4. Faktor Nilai Budaya

#### • Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Davis (2010), partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

#### B. Perilaku Pemilih

Perilaku memilih (*Voting behavior*) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Voting adalah: "Kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya". Ada dua macam teori *voting behaviour* yang dapat dikelompokkan dalam dua mazhab besar. *Pertama*, pendekatan Voting dari mashab sosiologis yang dipelopori oleh Colombia's university Bureau of Applied Social Science . *Kedua*, pendekatan voting dari mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Centre (Gaffar, 1992:4-9).

Susanto (1992) mengartikan *voting behavior* adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam Pemilu, seperti menunaikan, kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.

Perilaku memilih secara sederhana bisa didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidat atau partai politik tertentu baik dalam pemilihan anggota Legislatif maupun Eksekutif. Dinyatakan sebagai Pemilih dalam Pemilu yaitu mereka yang terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendataan peserta pemilih.

Adapun Perilaku Pemilih menurut Surbakti adalah "aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not vote*) dalam suatu Pemilihan umum. Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Adapun bentuk-bentuk perilaku pemilih yang dimaksudkan disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam kampanye, serta keikutsertaan masyarakat dalam partai politik dan juga puncaknya dalam keikutsertaan dalam pemungutan suara (*Vote*). Puncak pemungutan suara (*Vote*), disini dapat dilihat seberapa besar masyarakat yang benar ikut ambil bagian dalam Pemilu yang dilaksanakan.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin yang menjadi dukungannya. Begitupun sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal atau konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku memilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik ataupun kontestan pemilu. Masing-masing kontestan tentunya membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul pula pengelompokan ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dengan yang mereka menganut sekaligus menjauhkan ideologi yang bertentangan dengan mereka.

Dalam pengambilan keputusannya, maka masyarakat diperkirakan mempunyai tolak ukur yang tradisional yang meliputi tiga aspek penting.

- Identifikasi terhadap partai.
- Isu yang diusung partai atau calon dan
- Penampilan dan kepribadian calon

Menurut Gaffar (dalam Asfar, 2006) menjelaskan teori perilaku pemilih (*voting behavior*) dengan membagi tiga pendekatan utama yaitu Pendekatan Sosiologis (*Mazhab Columbia*), Pendekatan Psikologis (*Mazhab Michigan*), dan Pendekatan Rasional (*Mazhab Virginia*).

#### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis ini bermula di Eropa Barat dan di tangan para ahli ilmu politik dan sosiologi pendekatan ini dikembangkan. Para ahli ini mengemukakan masyarakat mempunyai kesadaran status yang kuat dan juga berdasarkan karakteristik masyarakat telah tersusun sedemikian rupa dengan berbagai latar belakang dan pendukung mazhab ini percaya bahwa untuk memahami perilaku individu maka perlu untuk memahami karakteristik yang ada dalam individu atau seseorang tersebut (Kumala Sari, 2011). Untuk melakukan tindakan tertentu dapat dipengaruhi oleh karakteristik social. Menurut Gaffar (dalam Kumala Sari, 2011) karakteristik tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori

##### a. Jenis kelamin

Didunia ini ada laki-laki dan perempuan dan penuntutan kesetaraan gender terjadi dimana-mana. Perempuan meminta hak seperti laki-laki, yang pada dasarnya di zaman sekarang laki-laki dan perempuan dianggap sederajat. Tapi tidak menutup kemungkinan perbedaan pola pikir juga termasuk dalam jenis kelamin.

##### b. Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan menjadi factor yang sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku kita dan dengan berbedanya tingkat pendidikan maka berbeda pula cara berperilaku atau cara memperlakukan sesuatu.

- c. Usia  
Karena kematangan usia akan mempengaruhi cara berpikir juga akan mempengaruhi tindakan dan cara menentukan pilihan.
- d. Pekerjaan  
Jika dilihat dari pekerjaan seseorang, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah perbedaan pola pikir misalnya orang yang pekerjaannya sebagai petani akan berbeda pola pikirnya dengan pegawai negeri sipil.

## 2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis eksis di Amerika Serikat (AS), dan awalnya berasal dari Eropa Barat. Mazhab ini mengembangkan konsep psikologi, terutama sikap dan sosialisasi. Dalam melihat perilaku pemilih, dengan landasan pendekatan psikologis, pemilih di Amerika memberikan suaranya berdasarkan pengaruh psikologis yang kuat terhadap dirinya sebagai objek sosialisasi, mereka menjelaskan kepribadian seseorang merupakan suatu hal yang vital dalam menentukan perilaku politik individu. Menurut pendekatan psikologis, perilaku pemilih dapat dianalisis menjadi tiga indikator yaitu:

- 1) Identifikasi partai adalah bagaimana individu/pemilih mengenali partai tersebut (misalnya dari rendah ketinggian).
- 2) Orientasi isu/tema merupakan topik yang menjadi bahan kampanye dari calon ataupun partai politik yang bersaing.
- 3) Orientasi kandidat adalah orang yang menjadi kandidat dalam pemilihan umum.

Kemunculan dari mazhab ini merupakan suatu bentuk dari ketidakpuasan dengan pendekatan sosiologis. Mazhab ini mengedepankan konsep sikap dan sosialisasi. Para ahli mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan pilihan individu berangkat dari sikap atau cerminan dari kepribadian seseorang dan itu menjadi variabel penentu perilaku politik seseorang. Mazhab ini menekankan pada persoalan respons yang didapatkan dilingkungan serta melihat bahwa didalam masyarakat terdapat rasionalitas dan kecerdasan dalam menentukan pilihan.

## 3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional diadaptasi dari ilmu ekonomi, kegiatan memilih melihat dari aspek untung-rugi (Surbakti, 1992) individu melihat akan timbulnya konsekuensi konsekuensi yang ada dalam pilihan tersebut, lalu individu akan menentukan pilihan dari apa yang memberikan mereka keuntungan yang paling besar bagi dirinya. Seperti yang dikemukakan oleh Asfar (2006), bahwa kedua mazhab yang telah dibahas diatas juga mengemukakan satu pendekatan yang menjadi kritik atas pendekatan sebelumnya kedua pendekatan diatas. Baik pendekatan sosiologis dan psikologis dianggap kurang dalam menganalisis perilaku pemilih karena menjadikan pemilih sebagai pion yang seakan mudah untuk ditebak bagaimana perilakunya, ahli menjelaskan bahwa perilaku pemilih tidak harus stagnan, karakter sosial identifikasi partai dapat berubah sewaktu-waktu.

Pendekatan ini berasal dari ilmu ekonomi yang dimana pemilih telah berpikir untuk memilih kandidat yang dapat memberikan mereka keuntungan yang lebih dengan kerugian yang sekecil-kecilnya.

Menurut Jack C. Plano (1985) Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan kampanye). Jadi perilaku tidak hanya diartikan sebagai pemikiran ataupun tanggapan yang bersifat abstrak, tapi juga sebagai tindakan-tindakan dari perilaku politik tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. (Moleong, 2013), dengan fokus penelitian perilaku masyarakat pemilih di Kecamatan Malalayang, pada Pilwako Kota Manado tahun 2020. Perilaku pemilih ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Affan Gaffar tentang teori perilaku pemilih (voting behavior). Gaffar membagi tiga pendekatan utama yaitu: Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Psikologis, dan

Pendekatan Rasional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PERILAKU PEMILIH PADA PILWAKO KOTA MANADO TAHUN 2020 DI KECAMATAN MALALAYANG**

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum, teori mengenai perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh dua pendekatan menurut Affan Gaffar yang menjelaskan teori perilaku pemilih (voting behavior), membagi tiga pendekatan utama yaitu Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia), Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan), dan Pendekatan Rasional (Mazhab Virginia). Temuan penelitian menggambarkan jika dilihat dari tiga pendekatan ini terkait dengan perilaku pemilih di Kecamatan Malalayang Kota Manado, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan Sosiologis lebih melihat pola perilaku pemilih memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara pemilih dengan aspek aspek sosial struktural yang lebih dominan yang mencakup status ekonomi, agama, etnik, serta wilayah tempat tinggal. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa perilaku masyarakat Malalayang sangat dipengaruhi dengan latar belakang calon kepala daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa faktor perilaku masyarakat Malalayang menentukan pilihannya memiliki kecenderungan melihat asal dari calon kepala daerah dan melihat pekerjaan serta jabatan yang diembannya sebagai faktor penentu oleh masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan mereka.

#### **2. Pendekatan Psikologis**

Pendekatan Psikologis dilakukan dengan mengidentifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap dari masyarakat pemilih dalam memutuskan calon atau terhadap isu-isu yang berkembang. Sikap seseorang atau sebagai refleksi kepribadian orang merupakan variable yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Para masyarakat pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, yang artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Melalui proses sosialisasi individu dalam mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya di dalam pemilihan umum, sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat kecamatan Malalayang juga dipengaruhi oleh kerja dan rasa kedekatan pada partai pengusung disuatu daerah sehingga dapat dilihat bahwa keberadaan partai politik pengusung juga dapat menarik minat dan antusiasme para pemilih. Bagi masyarakat pemilih yang mengetahui bagaimana kinerja partai itu, ataupun sudah ikut menjadi anggota partai tersebut, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk menjatuhkan pilihan terhadap calon yang berasal dari partai yang dia ketahui. Selain itu keyakinan atas profil kandidat yang diusung juga sangat mempengaruhi preferensi masyarakat sebagai penentu dalam membuat keputusan untuk memilih calon

Temuan tersebut menjelaskan bahwa pada masyarakat yang ada di kecamatan Malalayang pendekatan sosiologis terkadang saling berkaitan dengan pendekatan psikologis dalam mereka menentukan pilihannya. Ada masyarakat yang memilih seorang kandidat atas dasar pertimbangan kesamaan suku dan agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap,



baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan.

### **3. Pendekatan Rasional**

Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi. Temuan penelitian terkait dengan pendekatan ini adalah banyak masyarakat pemilih di Kecamatan Malalayang yang mendasari pilihannya kepada calon dengan menggunakan pertimbangan untung dan rugi. Indikator yang mereka gunakan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari visi dan misi calon Walikota. Informasi dimaksud mereka lihat atau dengar dari proses debat yang dilakukan para calon Walikota seperti di televisi maupun di media sosial.

Pertimbangan untung dan rugi yang dimaksud juga terbagi menjadi keuntungan secara kolektif (masyarakat umum Kota Manado khususnya yang ada di Kecamatan Malalayang), dan keuntungan secara pribadi. Kedua bentuk keuntungan ini saling berkelindan dan dijadikan bahan pertimbangan saat memberikan suara terhadap pasangan calon.

## **B. KECERENDUNGAN PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH di KECAMATAN MALALAYANG**

Dari tiga pendekatan yang ada, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih masyarakat di Kecamatan Malalayang, temuan penelitian menggambarkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihannya adalah pendekatan psikologis. Dimana masyarakat kecamatan Malalayang lebih melihat konteks siapa partai yang menjadi pengusung dari pasangan calon.

Hal itu terjadi karena masyarakat kecamatan Malalayang, saat Pilwako dilakukan merasa simpati dengan partai pendukung pasangan calon, sehingga siapapun calon yang diusung akan mereka dukung.

## **KESIMPULAN**

Preferensi masyarakat pemilih di kecamatan Malalayang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2020 lebih banyak didasari dari pendekatan psikologis. Karena mereka memilih calon dengan melihat siapa partai yang menjadi pengusungnya. Selain itu visi dan misi, kinerja dan pendekatan yang dilakukan oleh partai pengusung menarik minat dan antusiasme para masyarakat pemilih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. D., Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Affan Gaffar 1992. *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*. UII Press Yogyakarta
- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Pustaka Eureka Jakarta.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Inside Book Center.
- Budiardjo, Mirriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Davis, Gordon B. 2010. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Palembang: Maxikom.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom. 2000. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: McGraw – Hill Book Company.
- Fasli dan Supriadi, Djalal Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* . Jakarta: Rinika Cipta.
- Hidajat, Imam. 2009. *Teori-teori Politik (edisi revisi)*. Malang: Setara Press.

- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. "*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*". Jakarta: Rineka Cipta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia
- Kumala Sari, Muttaqin. 2011. *Gangguan Gastrointestinal*. Jakarta. Salemba
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Huntington, P. Samuel dan Nelson, Joan.1990. *Partisipasi Politik di Negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Plano, Jack. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV. Rajawali Press
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs - UNY.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sumaryadi. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- . 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Susanto.1992. *Pengantar Sosialisasi*. Jakarta:Rajawali Press.
- Yuwono, Teguh. 2001, *Manajemen Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.

#### **Sumber Lain:**

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,